*Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa 4 (2) 2023; 13-18*



Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa

**Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

**I Putu Febry Masprayoga*, Partiwi Dwi Astuti, Ni Luh Putu Mita Miati***

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali*

E-mail: putufebry821@gmail.com

***Abstract***

*The aim of this research is to determine the effect of the use of information technology & internal control systems on the quality of financial reports. The population in the study were financial department employees at 36 Badung Regency Regional Apparatus Organizations with a sample of 163 people determined using random sampling techniques. The data analysis technique used in this research is Multiple Linear Regression. Based on the research results, it was found that the use of information technology has a positive and significant effect on the quality of financial reports, the internal control system has a significant positive effect on the quality of financial reports.*

***Keywords:*** *Utilization of Information Technology, Internal Control Systems, Quality of Financial Reports*

**Abstrak**

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi & sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian adalah pegawai bagian keuangan pada 36 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung dengan sampel yang digunakan yaitu sebanyak 163 orang yang ditentukan dengan teknik random sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signfikan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

**Kata kunci:** Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan

*How To cite:*

I Putu Febry Masprayoga, Partiwi Dwi Astuti, Ni Luh Putu Mita Miati (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa, 4(2), 13-18.* *Doi:*

# PENDAHULUAN

Seiring perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, maka kebutuhan akan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja kepada publik, sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Edlin, 2018:1).

Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi (pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan) dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaporan keuangan tidak hanya meliputi komponen laporan keuangan, tetapi juga meliputi laporan-laporan lain yang diperlukan (Riandani, 2017:3).

Pemerintah daerah menjadikan laporan keuangan sebagai media mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik, laporan keuangan menggambarkan kegiatan yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur sehingga dapat menjelaskan kinerja dan tanggung jawab pengelolaan anggaran keuangan selama satu periode tertentu (Puspita dkk, 2020:79).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar (TW), dan pernyataan menolak memberi opini atau tidak memberi pendapat (TMP).

Menurut Binawati (2022:21) hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfataan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya (Wijana, 2017:45). Menurut Jogiyanto (2018:6) pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku karyawan teknologi dengan tugasnya, pengukurannya, berdasarkan frekuensi penggunaan dalam diversitas aplikasi yang digunakan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan informasi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan informasi akuntansi yang akan digunakan manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi secara tepat waktu, relevan, akurat dan lengkap.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Adanya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintah, otomatis juga menuntut aparatur harus mengubah dalam menyelesaikan pekerjaannya dari semula manual menjadi terkomputerisasi (Binawati, 2022:21).

Kualitas laporan keuangan juga dapat dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah. Menurut Mulyadi (2018:129) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemenUraian di atas menunjukkan masih adanya kesenjangan hasil penelitian. Oleh karenanya perlu dilakukan penelitian kembali tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan di OPD se- Kabupaten Badung karena Kabupaten Badung telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sejak tahun 2014 hingga 2022 dari BPK. Namun jika dirunut dalam beberapa tahun ke belakang, Kabupaten Badung sebetulnya memiliki opini bervariasi terhadap laporan keuangan yang dimilikinya. Pada tahun 2005 – 2007 Kabupaten Badung mendapat opini WDP, di tahun 2008 Kabupaten Badung mendapat opini Disclaimer, di tahun 2009 – 2010 Kabupaten Badung mendapat opini WDP, tahun 2011- 2012 Kabupaten Badung mendapat opini WTP, yang bermasalah adalah tahun 2013 Kabupaten Badung mendapat opini Tidak Wajar, setelahnya tahun 2014 – 2022 Kabupaten Badung mendapat opini WTP.

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per Desember 2022, atas rekomendasi BPK untuk laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2022, terdapat 11.020 rekomendasi senilai Rp 459.012 Miliar. Dari rekomendasi tersebut sebanyak 10.539 rekomendasi (96,09%) senilai Rp 225.770 Miliar telah ditindaklanjuti dengan semestinya. 378 rekomendasi (3,43%) belum sesuai rekomendasi, 16 rekomendasi (0,15%) belum ditindaklanjuti dan 87 rekomendasi (0,79%). Meskipun sudah mendapat opini WTP dari BPK namun pemkab Badung masih belum mampu menyelesaikan semua rekomendasi yang diberikan pihak BPK hal itu terlihat dari laporan akhir yang diserahkan BPK bahwa masih ada rekomendasi yang tidak diselesaikan oleh pihak Kabupaten Badung terkait penggunaan sistem informasi akutansi (http://www.bpk.go.id/). Permasalahan terkait laporan keuangan sangat terkait dengan sistem pengendalian internal. Berdasarkan pernyataan Sekda Badung yang dikutip dari (bandungkab.go.id) diketahui untuk saat ini Pemkab Badung telah memiliki sebanyak 80 orang auditor internal. Namun dikatakan sebetulnya untuk keadaan ideal jumlah auditor yang dibutuhkan adalah sebanyak 90 orang dan oleh karena itu akan ditambah secara bertahap. Dari segi pemanfaatan teknologi informasi untuk saat ini hampir semua kegiatan terkait pelaporan keuangan telah menggunakan teknologi untuk pela ksanaanya.

# TINJAUAN PUSTAKA

**Teori Keagenan *(Agency Theory)***

Menurut Elqorny (2009) teori keagenan (agency theory) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer. Pada suatu organisasi publik khususnya di pemerintahan daerah secara sadar atau tidak, teori keagenan ini telah dipraktikkan, termasuk pemerintahan daerah di Indonesia dalam mewujudkan tranparansi akuntabilitas publik (Sandanafu & Situmeang, 2018:101).

**Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal komputer, perangkat lunak, database, jaringan, electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi informasi (Purnama, 2020:406). Dalam PP No 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa situs adalah sebuah cara untuk menampilkan profil pemerintah daerah di internet dengan tujuan antara lain menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menerima masukan dari masyarakat. Selain akses profil pemerintah daerah yang terkait, dalam situs resmi tersebut masyarakat dapat mengakses mengenai informasi keuangan pemerintah daerah (Edlin, 2018:6).

**Sistem Pengendalian Intern**

Pengertian pengendalian intern dijelaskan dalam PP No. 8 Tahun 2006 dan PP No. 60 Tahun 2008. Menurut PP No. 8 Tahun 2006, sistem pengendalian intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi. Sedangkan menurut PP No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Sikumbang dkk, 2020:38).

**Kualitas Laporan Keuangan**

Idealnya kualitas laporan keuangan adalah laporan keuangan memberikan gambaran yang akurat tentang posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Informasi tersebut harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa depan. Semakin tajam dan jelas gambaran yang disampaikan oleh data keuangan, dan semakin jujur laporan keuangan memberikan gambaran yang akurat tentang posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Informasi tersebut harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa depan. Semakin tajam dan jelas gambaran data keuangan, semakin mendekati kebenaran (Ridzal dkk, 2022:3096).

# METODE

Tempat penelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Raya Sempidi Mengwi – Kabupaten Badung (80351). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan pada 36 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang berjumlah 275 orang. Metode Penentuan Sampel Dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling sebagai metode pengambilan sampel dengan simple random sampling.Dengan demikian, besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 162,96 orang, yang apabila dilakukan pembulatan menjadi 163 orang. Jenis data yang di gunakan yaitu data kuantitatif. Sumber data yang di gunakan yaitu sumber data primer. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

***Hasil***

***Analisis Regresi Linier Berganda***

Hasil uji normalitas menunjukan bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Hasil uji multikolinearitas bahwa nilai tolerance atau VIF maka dikatakan tidak ada gejala multikolinieritas. Sedangkan hasil uji heteroskedastisitas bahwa masing-masing model memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Adapun hasil analisis regresi dengan program Statitical Pacage of Social Science (SPSS) dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1**

**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | | *Unstandardized Coefficients* | | *Standardized Coefficients* | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |  |  |
| 1 | (Constant) | 5,815 | 2,007 |  | 2,898 | 0,004 |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1) | 0,613 | 0,90 | 0,481 | 6,800 | 0,000 |
| Sistem Pengendalian Intern (X2) | 0,367 | 0,80 | 0,326 | 4,604 | 0,000 |

*Sumber: data diolah 2023*

Berdasarkan Tabel 1 dapat ditulis Persamaan regresi linear berganda tersebut menunjukkan arah masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya:

Y = 5,815 + 0,613X1 + 0,367X2

Persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

β1= 0,613 berarti bahwa setiap peningkatan satu poin dalam skala pemanfaatan teknologi informasi yaitu ke arah lebih setuju terkait dengan peningkatan dalam skor kualitas laporan keuangan sebesar 0,613 dengan asumsi variabel lain konstan.

β2= 0,367 berarti bahwa setiap peningkatan satu poin dalam skala sistem pengendalian intern yaitu ke arah lebih setuju terkait dengan peningkatan dalam skor kualitas laporan keuangan sebesar 0,367 dengan asumsi variabel lain konstan.

***Pembahasan***

1. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemanfaatan teknologi informasi ditemukan pengaruh positif signifikan terhadap laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Hal ini berarti bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Menyajikan laporan keuangan berkualitas merupakan bentuk akuntabilitas publik yang merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agensi/pemerintah) untuk memberikan pertanggungjelasan kegiatan yang dilaksanakannya kepada pemberi amanah (masyarakat). Melalui pemanfaatan teknologi informasi maka akuntabilitas publik dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Hasil penelitian ini mendukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chodijah dan Hidayah (2018), Utari dkk (2020), Sikumbang dkk (2020), dan Imelia dkk (2021) mengungkapkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem pengendalian intern ditemukan pengaruh positif signifikan terhadap laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Hal ini berarti bahwa semakin baik sistem pengendalian intern maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Sistem pengendalian intern akan dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga nantinya pemerintah akan dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Hal penelitian ini mendukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Riandani (2017), Chodijah dan Hidayah (2018), Utari dkk (2020), dan Sikumbang dkk (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan sifnifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

.

# SIMPULAN DAN SARAN

# SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka didapat simpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

**SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung diharapkan secara berkala melaksanakan pendataan terhadap komputer yang telah usang tepat pada waktunya, kemudian pimpinan harus secara berkala melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi. Selain itu memberikan pelatihan kepada pegawai, agar nantinya pegawai dapat laporan keuangan secara tepat waktu.

Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambahkan variabel lainnya seperti kompetensi sumber daya manusia dan partisipasi penyusunan anggaran. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penambaham jumlah sampel dan memperluas ruang lingkup penelitian yang tidak hanya terbatas Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung melainkan bisa melakukan penelitian di Kabupaten lain ataupun di seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Provinsi Bali.

# DAFTAR PUSTAKA

Arens, Alvin A., dkk. (2008). Auditing dan Jasa Assurance (12th ed.). Jakarta: Erlangga.

Binawati, E. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akutansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Dinas-Dinas SKPD di Kabupaten Klate. Optimal, 19, 21.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2022. https://www.bpk.go.id/).

Darmawan, A., & Darwanis. (2018). Pengaruh Sistem Pengendallian Internal, Pemanfaatan Teknologi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPA Provinsi Aceh. Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 3, 11.

Edlin, D. N. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Tekologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Modera ting (Studi Empiris pada OPD Kota Duma. 1, 1.

Herman Darwis, & Meliana. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistim Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 1, 77.

Jogiyanto, Hartono. (2018). Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data. Yogyakarta: Andi

Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI. Mulyadi. (2018). Akuntansi Biaya. Cetakan 15, 5. Yogyakarta: YKPN

Purnama, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akutansi, Standar Akutansi Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhdapan Kualitas Laporan Keuangan Wajib Pajak Badan. Akutansi & Manajemen Akmenika, 17, 406.

Puspita, D., Fadli, & Halimatusyadiah. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Standar Akutansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kulitas Laporan Keuangan Kabupaten Seluma. Fairness, 10, 79.

Riandani, R. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kab. Limapuluh Kota). 3.

Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. Akuntansi, 6, 3096.

Sandanafu, Sally Paulina dan Situmeang, M. F. (2018). Pengaruh Kapasitas SDM, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Maneksi, 7(2), 94–99.

Sholihah, N. N., Zubaidi, A., & Diri, I. (2020). Sistem Informasi Pengelolaan Data Penduduk Kantor Kelurahan Karang Baru Kota Mataram Berbasis Website. Jurnal Begawe Teknologi Informasi (JBegaTI), 1(1), 56–67. https://doi.org/10.29303/jbegati.v1i1.286

Sikumbang, M., Pakaya, L., & Blongkod, H. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas SDM, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi pada OPD Provinsi Gorontalo. Jambura Accounting Review, 1, 38.

Teddy, J., & Supomo, B. (2002). Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas- Teknologi dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntan Publik. Riset Akuntansi Indonesia, 5(2), 214–228.

Wijaya, (2017). “Manajemen Keuangan Konsep dan Penerapannya”. Jakarta: PT. Grasindo